

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia mencatat suatu peristiwa penting dalam perjalanan sejarahnya untuk sampai pada masa seperti sekarang ini, peristiwa yang dimaksud ialah revolusi kemerdekaan yang terjadi kurun waktu 1945-1949 (Ricklefs, 2005, hlm. 317). Revolusi kemerdekaan dengan rentang waktu diantara tahun 1945 hingga 1949 tersebut menjadi suatu masa pergolakan politik yang cukup besar. Tahun-tahun tersebut ialah salah satu bagian yang cukup krusial dalam sejarah pembentukan Negara kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Bangsa kita pasca para pendiri negara dan bangsa (*founding fathers*) memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan menjadi sebuah anugerah atas semua usaha yang tidak menentu sebelumnya untuk mencari identitas bangsa dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk perubahan suatu tatanan sosial yang lebih adil sampai pada akhirnya membuahkan hasil. Untuk pertama kalinya di dalam kehidupan rakyat Indonesia segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba. Tradisi nasional yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia berjuang bahu membahu selama revolusi hanya merupakan sedikit dasar sejarah (Ricklefs, 2005, hlm. 320). Disaat besarnya antusiasme masyarakat terhadap berita proklamasi, kemudian tidak berlangsung lama, pada 8 September 1945 ketika ribuan tentara Belanda datang dan bermaksud menguasai kembali republik Indonesia dibantu tentara sekutu yang dipimpin oleh A.G. Greenlagh yang dibarengi oleh pegawai *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) tiba dengan misi pertama yaitu melaporkan bagaimana kondisi Indonesia pasca proklamasi dan juga membebaskan tawanan perang tentara sekutu yang ada di Indonesia (Sejarah Militer Kodam Siliwangi VI, 1968, hlm,47).

Pasca datangnya Belanda dan sekutu untuk kembali ke Indonesia, masyarakat yang sudah merasa merdeka dan tidak ingin Indonesia kembali menghadapi rasa lelah dan tertindas akan suatu bentuk penjajahan, kemudian bangkit dan bergerak untuk membuat suatu revolusi kemerdekaan dengan cara

mengangkat senjata melawan Belanda yang mereka anggap sebagai Negara penjajah. Revolusi yang kemudian menjadi alat tercapainya kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sebagai peristiwa yang hanya tercatat dalam sejarah bangsa, melainkan juga suatu unsur yang kuat di dalam persepsi bangsa Indonesia. Revolusi kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah titik balik berdirinya bangsa Indonesia. Tentu, hal ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika yang terjadi di dalam Revolusi Indonesia tersebut. Dinamika yang terjadi yaitu bagaimana sikap Indonesia dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang terjadi terutama dengan datangnya kembali Belanda dengan sekutu ke Indonesia. Dalam menghadapi pihak Belanda dan sekutu ini tentu dibutuhkan sebuah strategi, yang paling umum kita ketahui pola bertempur dan berunding yang nampak cukup efektif dalam menghadapi Belanda dan sekutu di Indonesia. Selain itu, tidak dapat dihilangkan berbagai dinamika dan gejolak politik yang terjadi didalam internal Indonesia itu sendiri (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, hlm. 1-2).

Dalam proses awal Revolusi perdebatan tentang perlunya bertempur atau berunding dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. "... merupakan titik balik bagi elite pemimpin Indonesia untuk melakukan refleksi: apakah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu akan dilakukan dengan cara bertempur atau berdiplomasi" (Suwirta, 2015, hlm. 7). Proses revolusi itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari banyaknya pertempuran yang terjadi di setiap daerah di Indonesia dan tidak dapat dipungkiri juga adanya gejatan senjata yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Indonesia menurut Roem (1972, hlm. 88) "gejatan senjata ini harus benar-benar ditaati dan prinsip-prinsip politik yang harus dilaksanakan bagi kebebasan, kedaulatan dan kerjasama antar dua bangsa besar [...]". Walaupun hingga akhirnya Republik Indonesia pun, dihadapkan pada pilihan pasca kemerdekaan yang lebih condong memilih untuk berdiplomasi dengan pihak sekutu dalam hal ini adalah Belanda. Perundingan-perundingan pun terjadi dimulai dari perundingan Hooge Veluwe, Linggarjati, Renville, Roem-Roijen hingga Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Perundingan-perundingan tersebut menuai pro dan kontra, misal saja perundingan Linggarjati. Tanggal 15 November 1946, di mana ketika itu Sutan Sjahrir memimpin delegasi Indonesia dalam

perundingan Linggarjati, delegasi Belanda diketuai oleh Schmerchon dan ditengahi oleh perwakilan dari Inggris, yakni Lord Killearn (Roem, 1977, hlm. 9). Satu hal lain yang menjadi tendensi dalam perundingan Linggarjati adalah sistem pemerintahan Federal yang terjadi dikehendaki dalam perundingan Linggarjati. Van Mook salah seorang anggota dari perwakilan Belanda dalam perundingan Linggarjati, juga sebagai *Former Governor-General of the Dutch East Indies* menyatakan bahwa sistem federasi tersebut merupakan kerjasama antara Belanda dan Indonesia (Kahin, 2013, hlm. 278).

Perundingan Linggarjati menjadi suatu peristiwa yang dianggap tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia dan rakyat banyak yang tidak setuju dengan perundingan tersebut. Pasalnya Indonesia yang memiliki wilayah dari Sabang (Sumatera) hingga Merauke (Papua) harus mengakui wilayahnya hanya Jawa, Madura dan Sumatera. Hal ini yang membuat banyaknya protes dari masyarakat kala itu dan melihat adanya niat Belanda datang kembali, yang pada saat itu sedang gencar melakukan "gerakan federalisasi " dimana dengan membentuk yang kita kenal dengan "negara boneka ciptaan Van Mook". Sebagai suatu taktik dan strategi Belanda untuk dapat kembali menguasai wilayah jajahannya di Indonesia. Belanda kemudian menganggap bahwa Republik Indonesia sebagai negara merdeka, sehingga tidak pantas untuk diajak berdialog, dan Belanda lebih menganggap bahwa Republik Indonesia tidak pernah ada. Dalam pandangan tokoh-tokoh Republikan hal ini menjadi suatu ancaman karena dinilai dapat memecah-belah Indonesia. Akan tetapi bagi para tokoh non-Republikan terutama tokoh yang berkuasa di wilayahnya masing-masing hal ini menjadi satu kesempatan selain untuk mengkritisi pemerintah juga berkuasa (kembali) di wilayahnya masing-masing tanpa campur tangan lebih dari pihak pemerintah Indonesia. Hal ini yang menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia, dimana para pendiri bangsa dan rakyat bahu membahu dalam bertempur dan melakukan aksi protes di setiap daerah akan ketidaksepakatan terhadap perundingan yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Muncul suatu gerakan di daerah yang memanfaatkan keadaan negara pada saat itu untuk kepentingannya membuat suatu gerakan pasca perjanjian Linggarjati salah satunya yang terjadi di Jawa Barat.

Beberapa tokoh Non-Republikan di Jawa Barat yang sangat menggelora semangatnya untuk kembali menjadi penguasa di wilayahnya, salah satunya adalah R.A.A.M Suria Kartalegawa yang merupakan mantan bupati Garut (1929-1944). Dalam konteks ini, dan dengan dibantu inisiatif Belanda, Sudah sejak perundingan atau perjanjian dengan Perdana Menteri Syahrir awal 1946 kedua belah pihak (Belanda dan Suria Kartalegawa) kemudian memutuskan untuk bersama-sama membentuk Negara Indonesia Serikat di Jawa Barat (Negara Pasundan) yang tidak termasuk dalam Republik Indonesia. Kesepakatan definitif lalu tercapai dalam perundingan Linggajati yang diparaf oleh Syahrir dan wakil Belanda (Schermerhorn) pada 15 November 1946. Sebelum naskah itu disahkan (ratifikasi). Mereka membuat kesepakatan atas kepentingan mereka masing-masing. Surya Kartalegawa dalam hal ini dengan sengaja atau tidak menjadi alat dari van Mook dalam usahanya mencari jalannya sendiri di luar kesepakatan dan persetujuan yang telah dicapai dengan Republik Indonesia. Kesepakatan dan persetujuan yang dibuat yang bertentangan itu adalah gagasan tentang negara federal bagi Indonesia dengan tujuan untuk mendirikan negara bagian di wilayah Jawa Barat, yakni Negara Pasundan. Sebelum Negara Pasundan didirikan maka diperlukan dukungan tidak hanya secara politis, namun secara sosial budaya.

Pada 18 November 1946 RAAM. Suria Kartalegawa mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Rakyat Pasundan yang kemudian disebut PRP (Kusumasumantri, 2002, hlm. 292) dengan tujuan mencapai kesempurnaan Negara Pasundan yang merdeka berdaulat berdasarkan demokrasi (kerakyatan) dalam ikatan federasi termasuknya Negara Pasundan sebagai negara (tidak masuk sebagai daerah dari Republik Jawa dan Sumatera), dari Negara Indonesia Serikat, dalam sementara waktu dalam lingkungan Kerajaan Belanda (Sjamsudin, 1992, hlm. 29). Partai Rakyat Pasundan (PRP) yang didirikan oleh Suria Kartalegawa ini sangat menarik perhatian, pasalnya pada tahun-tahun yang sama ketika partai politik lain memperkenalkan dirinya berdasarkan ideologi yang dianutnya semisal Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang berideologi sosialis, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berideologi komunis, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang berideologikan Islam, namun PRP hadir sebagai partai yang bercorak kedaerahan berbeda dengan partai politik lain yang eksis ketika itu. Jelas

hal ini menjadi tanda bahwa PRP didirikan kepentingan primodialisme (Zuhdi, 1994, hlm. 11). Sistem primodialisme ini yang beberapa hal ternyata tidak memudahkan tujuan Belanda dalam konsensinya untuk membentuk negara Federal di Indonesia (Poesponegoro, & Notosusanto, 2010, hlm. 98). Meskipun Belanda melupakan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah yang beragam. Menurut Sumardjo (2015, hlm. 159) dilihat dari bahasanya, sudah ada bahasa Cirebon, Sunda dan Jawa Banten. Dilihat dari kelompok ras sudah ada kelompok Tionghoa dan Arab, jika dilihat dari keseniannya sudah beragam lagi ada Pakelaran dan Pakidulan (Priangan dan Sukabumi).

Setelah berdirinya Partai Rakyat Pasundan, adanya reaksi keras yang muncul dari Pemerintah Republik yang mengakui sebagai suatu pelanggaran terhadap Linggajati, tetapi juga dari para rakyat Jawa Barat sendiri, baik yang berada di Yogyakarta maupun di Jawa Barat (Sjamsudin dkk., 1992, hlm. 31). Dalam sejarahnya pun peristiwa revolusi kemerdekaan yang terjadi di Jawa Barat terdapat adanya perlawanan rakyat kepada Belanda. Banyak sekali peristiwa yang dilakukan pada masa revolusi Indonesia saat itu, baik itu pada masa awal penjajahan hingga mencapai kemerdekaan. Saat terjadi revolusi tersebut tercatat beberapa peristiwa yang terjadi merupakan salah satu bukti adanya perlawanan dan pertempuran yang dilakukan oleh rakyat di tiap daerah untuk mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Terkait dengan munculnya peristiwa perlawanan yang dilakukan rakyat Jawa Barat terhadap hegemoni pihak Belanda di Indonesia, inilah yang menjadi kekesalan tokoh dan rakyat Jawa Barat akan dibentuknya PRP yang seolah tidak melihat perjuangan masyarakat Jawa Barat sebelumnya. Jelas dalam perkembangannya pembentukan Partai Rakyat Pasundan ini dibuat oleh Suria Kartalegawa sebagai kendaraan politiknya untuk membuat Negara Pasundan yang berbeda arahnya dengan Republik. Selain membawa sentimen kedaerahan dengan membawa cerita sejarah para pendahulunya, Partai Rakyat Pasundan juga berkeinginan untuk memperlihatkan kemampuan orang-orang sunda untuk memimpin suatu Negara federal bernama Negara Pasundan. Walaupun yang menjadi catatan menarik ialah tidak diberikan nya dukungan oleh sebagian dari rakyat yang pro Republik bahkan

orangtua Suria Kartalegawa sendiri yang berada di Garut sangat mementang gerakan yang dibuatnya itu (Sjamsudin dkk., 1992, hlm. 29).

Terbentuknya PRP ini kemudian Menimbulkan sebuah konflik yang tak terbantahkan bagi rakyat Jawa Barat tentu konflik ini berawal pada tokoh-tokoh yang terlibat terutama kaum menak yang pada saat itu menjadi hal umum menjadi sebuah panggilan para bangsawan asal Sunda (Jawa Barat). Rakyat Pasundan sebelumnya 100 persen memihak kepada republik menjadi terpecah, pro Republik menolak Belanda dan pro Belanda sebaliknya yaitu menolak Republik.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik dan memilih mengkaji mengenai Partai Rakyat Pasundan tahun 1947 yaitu dalam penelitian ini dengan acuan Suria Kartalegawa menjadi wali Negara Pasundan pertama meskipun dalam perkembangannya akan digantikan oleh Wiranatakusumah V sebagai wali negara Pasundan dan tahun 1950 ditandai dengan berakhirnya Negara Pasundan dan berakhir pula Partai Rakyat Pasundan, di mana Negara Pasundan bubar diikuti dengan bubarnya Partai Rakyat Pasundan. Kiprah Partai Rakyat Pasundan dalam Negara Pasundan ini jelas harus dibedakan Negara Pasundan I dan II di mana dalam perjalanan Negara Pasundan I pada tahun 1947 akan lebih membahas bagaimana PRP menjalankan roda pemerintahan karena yang menjadi Wali Negara saat itu adalah Suria Kartalegawa (Yahya, 2008, hlm. 11). Negara Pasundan II pada tahun 1948 yang menjadi Wali Negara adalah seorang Republikan, yakni R.A.A Wiranatakusumah V yang kemudian akan disebut dengan Wiranatakusumah V. Pada masa negara Pasundan II, Partai Rakyat Pasundan melakukan peranannya, karena Wiranatakusumah V dianggap bertentangan dengan kepentingan Partai Rakyat Pasundan terutama Suria Kartalegawa, Partai Rakyat Pasundan lebih banyak menjadi oposisi dalam konteks pemerintahan Negara Pasundan. Namun meskipun begitu, terkadang Partai Rakyat Pasundan setuju dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Wali Negara atau jajarannya yang lain bila kepentingan tersebut dianggap sejalan dengan kepentingan Partai Rakyat Pasundan dalam parlemen.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya Partai Rakyat Pasundan ?
2. Bagaimana peran tokoh pendiri Partai Rakyat Pasundan ?
3. Bagaimana sepak terjang Partai Rakyat Pasundan dalam Pemerintahan Negara Pasundan ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah :

1. Mendeskripsikan keadaan sosial politik masyarakat dalam berdirinya Partai Rakyat Pasundan.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang membuat partai rakyat pasundan semakin berkembang.
3. Menganalisis kaitan antara Partai Rakyat Pasundan dengan Negara Pasundan.
4. Menganalisis keadaan sosial politik yang menyebabkan bubarnya Partai Rakyat Pasundan.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai Partai Rakyat Pasundan dalam Negara Pasundan. Selain itu, secara khusus penelitian ini dibuat agar bermanfaat untuk:

1. Memperkaya penulisan sejarah perjuangan bangsa Indonesia khususnya mengenai Sejarah Revolusi fisik.
2. Memberikan pengetahuan dan referensi untuk topik kajian Kiprah Partai Rakyat Pasundan Dalam Negara Pasundan (1947-1950).
3. Memperkaya materi pembelajaran sejarah wajib di SMA/ sederajat tentang Kompetensi Dasar 3.1 tentang 3.1.Mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI).

4. Menumbuhkan rasa kebanggaan akan sejarah nasional.

### **1.5. Struktur Organisasi Penelitian**

Pada tahapan ini semua sumber yang ditemukan coba untuk dianalisis serta ditafsirkan dan akhirnya dituangkan menjadi suatu tulisan ilmiah yang sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah di lingkungan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun struktur organisasi penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas secara terstruktur tentang latar belakang masalah yang peneliti angkat yaitu “Kiprah Partai Rakyat Pasundan Dalam Negara Pasundan (1947-1950)” Bab ini menjelaskan latar belakang masalah mengenai alasan kemunculan partai rakyat pasundan, tujuannya membentuk negara pasundan, perkembangan hingga menyatakan untuk bubar bagi peneliti. Dalam bab ini terdapat rumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai langkah untuk memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Pada bagian akhir bab ini menjelaskan tentang struktur organisasi penelitian yang menjadi acuan untuk melakukan penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, membahas tentang Tinjauan Pustaka atau Landasan Teori. Pada bab ini dijelaskan konsep-konsep yang dirasa relevan dan dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Konsep tersebut dapat berasal dari sumber buku, internet, artikel jurnal, e-book. Selain itu, dalam bab ini dijelaskan juga tentang penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Bab III Metode Penelitian, memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Mulai dari mencari sumber, mengolah sumber-sumber yang didapatkan dan tahapan lainnya. Metode yang digunakan merupakan metode historis dengan pendekatan studi literatur.

Bab IV pembahasan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Dimulai dari bagaimana latar belakang terbentuknya Partai Rakyat Pasundan. Kemudian bagaimana peranan tokoh pendiri Partai Rakyat Pasundan dalam mengembangkan Partai. Diakhiri dengan bagaimana kiprah Partai Rakyat Pasundan dalam Pemerintahan Negara Pasundan.

Bab V Penutup, merupakan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang telah dikaji. Menjelaskan sintesa dari awal munculnya, perkembangan hingga bubarnya partai rakyat pasundan dalam tujuannya membentuk Negara pasundan serta memberikan rekomendasi tentang penelitian ini sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca atau pihak terkait.